

Analisis Pendekatan Pembiayaan Pendidikan

Arsyad Riyadi¹, Nurfuadi²

^{1,2}UIN Saizu Purwokerto

Corresponding author : arsyadriyadi@yahoo.com

ABSTRAK

Ketidakhahaman mengenai pendekatan pembiayaan secara makro dan mikro ini akan berakibat fatal jika masing-masing pihak berpihak pada pendekatannya sendiri. Pertama, masyarakat/orang tua menganggap bahwa pembiayaan dari pemerintah seharusnya sudah mencukupi semua kebutuhan sekolah. Kedua, sebaliknya sekolah selaku pengelola dana dari pemerintah menganggap bahwa dana yang dikelola tidak mencukupi sehingga perlu meminta sumbangan pada masyarakat/orang tua. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis dokumen postur pendidikan pemerintah, dokumen hasil penelitian maupun hasil kuesioner mengenai kebutuhan pribadi siswa. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa : (1) dana pendidikan dengan alokasi 20% dari APBN digunakan untuk semua komponen anggaran pendidikan secara nasional; (2) masih tingginya beban yang harus ditanggung oleh masyarakat/keluarga dalam pembiayaan pendidikan. Dengan melakukan pemahaman yang lengkap mengenai kedua pendekatan tersebut diharapkan adanya kesamaan pemahaman bahwa pendanaan pendidikan adalah kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat. Selain pemerintah berupaya menaikkan anggaran pendidikan, sekolah juga tidak berlebihan meminta dana dari masyarakat, karena memang beban masyarakat sudah besar dalam menanggung biaya lain. Sebaliknya masyarakat, juga semakin menyadari bahwa pendanaan yang dimiliki sekolah juga terbatas. Sehingga diharapkan akan didapatkan titik temu yang harmonis dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menyikapi pembiayaan pendidikan.

Kata Kunci: pembiayaan pendidikan, pendekatan pembiayaan makro, pendekatan pembiayaan mikro

Korespondensi:

Arsyad Riyadi. UIN Saizu Purwokerto. Jalan Ahmad Yani No. 40A Purwokerto. Email : arsyadriyadi@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Pembiayaan merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa adanya pembiayaan, dapat dikatakan proses pendidikan tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pemahaman tentang seluk-beluk pembiayaan pendidikan menjadi hal penting, dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi termasuk mengenai pendekatan yang digunakan.

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal berbagai kategori pembiayaan pendidikan. Pertama, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Kedua, biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*). Ketiga, biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*).

Dalam kenyataannya, ketiga kategori biaya pendidikan tersebut dapat “bertumpang tindih”; misalnya ada biaya pribadi dan sosial yang bersifat langsung dan tidak langsung serta berupa uang atau bukan uang. Ada juga biaya langsung dan tidak langsung serta biaya pribadi dan sosial yang dalam bentuk uang maupun bukan uang.

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pendekatan pembiayaan yang meliputi pendekatan makro (nasional) dan pendekatan mikro (satuan pendidikan). Ketidakhahaman mengenai pendekatan ini akan berakibat fatal jika masing-masing pihak berpihak pada pendekatannya sendiri. Pertama, masyarakat/orang tua menganggap bahwa pembiayaan dari pemerintah seharusnya sudah mencukupi semua kebutuhan sekolah. Kedua, sebaliknya sekolah selaku pengelola dana dari pemerintah menganggap bahwa dana yang dikelola tidak mencukupi sehingga perlu meminta sumbangan pada masyarakat/orang tua.

Berbagai penelitian yang dilakukan lebih banyak membahas mengenai pendanaan yang berasal dari pemerintah. Banyaknya sumbangan yang diberikan oleh masyarakat, apalagi yang tidak masuk RAPB, tidak menimbulkan kesadaran bersama bahwa dana yang dikeluarkan mereka bukan sekedar sebagai tambahan atau pelengkap bagi sekolah. Dengan hanya menggunakan pendekatan dana dari pemerintah, maka besarnya pengeluaran dari keluarga atau masyarakat tidak pernah diketahui berapa besarnya. (Supriadi, 2003, p. 30)

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai pembiayaan pendidikan baik dalam pendekatan makro maupun mikro sehingga akan memunculkan kesadaran bersama perlunya gotong royong dari semua pihak untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Dari penelitian ini juga akan didapatkan perkiraan pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat/keluarga sehingga bisa menjadi gambaran bagi pemerintah setempat untuk dapat meningkatkan besar bantuan kepada siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji pendekatan pembiayaan secara makro (nasional) dengan mempelajari dokumen postur keuangan serta pembiayaan mikro (satuan pendidikan) dengan mempelajari dokumen pembiayaan sekolah. Kuesioner diberikan kepada orang tua untuk mendapatkan gambaran yang nyata pengeluaran dalam pembiayaan pendidikan anak-anaknya. Data dari dokumen maupun hasil kuesioner itu selanjutnya dianalisis, direduksi, untuk mendapatkan poin-poin yang penting sebagai rangkuman.

HASIL PENELITIAN

Pendekatan Makro Pembiayaan Pendidikan

Di setiap negara, faktor utama yang menentukan besaran perhitungan biaya pendidikan adalah kebijakan dalam dalam pengalokasian anggaran pendidikan. Adanya perbedaan cara dalam menyelenggarakan pendidikan, maka besaran satuan biaya pendidikan di setiap negara pun akan bervariasi. Untuk membandingkan biaya pendidikan pada tiap jenjang di setiap negara, metode yang digunakan adalah dengan membandingkan biaya operasional pendidikan dan sumber keuangannya, yang bisa dilihat dari persentase GNP (gross national product) dari tiap negara (Rojii et al., 2020, p. 16).

Di lihat dari sumber-sumbernya, biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal dari : (1) pendapatan negara dari sektor pajak (yang beragam jenisnya); (2) pendapatan dari sektor non-pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang lazim dikategorikan dalam “gas” dan “non-migas”; (3) keuntungan dari ekspor barang dan jasa; (4) usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan negara (BUMN), serta (5) bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah melalui kerjasama multilateral maupun bilateral. Alokasi dana untuk setiap sektor pembangunan, termasuk pendidikan ditaukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun (Supriadi, 2003, p. 5).

Bandingkan rincian di atas dengan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang terdapat pada Peraturan Presiden RI No. 104 tahun 2022. Pada APBN 2022 terdiri dari (1) anggaran pendapatan negara; (2) anggaran belanja negara; dan (3) pembiayaan anggaran. Anggaran pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Berikut ini rincian anggaran pendidikan negara Indonesia tahun anggaran 2021 dan 2022

No	Komponen Anggaran Pendidikan	APBN 2021 (dalam milyar)	APBN 2022 (dalam milyar)
1	Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat	184.535,60	182.810,29
2	Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa	299.064,40	290.544,05
3	Anggaran pendidikan melalui pembiayaan	66.405,70	69.477,58
	Jumlah	550.055,70	542.831,92

Secara lebih detail, postur anggaran pendidikan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No	Komponen Anggaran Pendidikan	Anggaran (milyar)
1	Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	184.535,60
	a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	81.534,00
	b. Kementerian Agama	55.885,50
	c. Kementerian Kementerian Negara/Lembaga lainnya	23.066,10
	d. Cadangan anggaran pendidikan	24.050,00
2	Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	299.064,40
	a. Dana Transfer Khusus (DAK)	135.131,40
	b. DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	156.588,10
	c. Otsus yang Diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan	5.994,90
	d. Dana insentif daerah	1.350,00
3	Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)	66.405,70
	a. Dana Pengembangan Pendidikan	20.000,00
	b. Dana Abadi Penelitian	3.000,00
	c. Dana Abadi Kebudayaan	2.000,00
	d. Dana Abadi Perguruan Tinggi	4.000,00
	e. Pembiayaan Pendidikan	37.405,70
4	Total Anggaran Pendidikan	550.005,60

5	Total Belanja Negara	2.750.028,0
6	Rasio Anggaran Pendidikan	20,0

Dana yang dikelola Kemdikbud, sebesar 81.434.001.080, dapat diuraikan dalam program berikut. (MoEC, 2021, p. 20)

Kementerian/ Program	Alokasi (Rp. 000)	%
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	81.534.001.080	100,00%
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	11.868.301.547	14,56%
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.087.702.794	1,33%
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	12.269.248.017	15,05%
Program Pendidikan Tinggi	28.205.232.540	34,59%
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.669.792.391	5,73%
Program Dukungan Manajemen	23.433.723.791	28,74%

Anggaran per unit eselon 1 dapat diuraikan sebagai berikut. (MoEC, 2021, p. 21)

Kementerian/ Program	Alokasi (Rp)	%
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	81.534.001.080.000	100,00%
Sekretariat Jenderal	32.010.268.258.000	39,26%
Inspektorat Jenderal	206.127.401.000	0,25%
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	4.684.368.354.000	5,75%
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	860.910.306.000	1,06%
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	586.524.767.000	0,72%
Ditjen Kebudayaan	1.641.817.720.000	2,01%
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	2.863.147.453.000	3,51%
Ditjen Pendidikan Tinggi	31.262.959.088.000	38,34%
Ditjen Pendidikan Vokasi	7.417.877.733.000	9,10%

Rincian anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

Akun	Alokasi (Rp)	%
Total	81.534.001.080.000	100,00%
Belanja Pegawai	25.408.866.802.000	31,16%
Belanja Barang	32.082.458.257.000	39,35%
Belanja Modal	4.941.639.021.000	6,06%
Belanja Bansos	19.101.037.000.000	23,43%

Program/unit/kegiatan/KRO/RO dari rincian anggaran tersebut bervariasi seperti siswa, lembaga, satuan pendidikan, kab./kota, orang, paket, model, even, platform, dokumen, karya, desa, wilayah, dan sebagainya. Dengan sasaran siswa misalnya terkait dengan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP), siswa SMK yang tersertifikasi. Termasuk juga dalam kategori mahasiswa, yakni yang mendapatkan KIP kuliah, beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK), mahasiswa yang mengikuti transfer kredit dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL), mahasiswa yang menjalankan wirausaha dan mahasiswa yang mendapat beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB). Dengan sasaran satuan pendidikan misalnya sekolah yang mendapatkan pembinaan program afirmasi, sekolah yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan OPK, sekolah yang mendapatkan pembinaan kinerja (*scorecard*), sekolah penggerak, sekolah yang menerapkan kurikulum dan model pembelajaran yang berlaku, sekolah yang mendapatkan pembinaan MBS, dan lainnya (MoEC, 2021).

Pendekatan Mikro Pembiayaan Pendidikan

Pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (*total cost*) dan jumlah biaya satuan (*unit cost*) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Satuan ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya siswa. Sehingga, satuan biaya ini dapat diketahui dengan membagi seluruh pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan (Machali & Hidayat, 2018, p. 405).

Tujuan dari analisis biaya ini adalah untuk memberikan informasi dan memberikan kemudahan kepada para pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan sekolah lebih lanjut. Selain itu analisis juga digunakan untuk efektivitas maupun efisiensi pengolahan anggaran serta peningkatan mutu pendidikan (Rojii et al., 2020, p. 16).

Secara khusus, analisis manfaat biaya pendidikan dijadikan acuan bagi pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN, di samping sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan mutu pendidikan. Bagi masyarakat, analisis manfaat biaya pendidikan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan “investasi” di dunia pendidikan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dan dipelajari, karena pada sebagian masyarakat ada pemahaman konsep bahwa pendidikan hanya menghabiskan uang tanpa ada jaminan peningkatan hidup yang jelas di masa mendatang (Rojii et al., 2020, p. 18).

Dari hasil penelitian mengenai pendanaan pendidikan dasar dan menengah pada satuan pendidikan formal, didapatkan hasil sebagai berikut (Zamjani et al., 2020, p. 21).

1. BOP (biaya operasional personalia) cenderung akan meningkat sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Perbedaan menyolok pada SLB, yang memiliki jumlah guru sangat besar namun dengan siswa kecil.
2. Biaya BONP (biaya operasional non personalia) cenderung akan meningkat dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Khusus untuk SMK, besarnya BONP lebih besar karena memang banyak kegiatan praktik yang membutuhkan biaya.
3. Biaya investasi SDM yang mencakup berbagai upaya peningkatan kapasitas SDM sekolah paling tinggi pada SMK, karena memang membutuhkan pengembangan profesi yang lebih dibanding jenjang lainnya.

Selanjutnya dari perkembangan besaran BOS menurut satuan pendidikan tahun 2015 - 2019 (Zamjani et al., 2020, p. 15), juga dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara BOS dan BONP masing-masing jenjang tidak begitu jauh berbeda.

Angka yang sangat menyolok ada di SMK, dengan dengan BOS sebesar Rp. 1.600.000 dan Rp. 3.349.000 untuk BONP. Artinya menunjukkan adanya kesenjangan yang tinggi antara biaya riil yang dikeluarkan sekolah yang berakibat kualitas lulusan SMK paling rendah dibanding satuan pendidikan yang lain. Meskipun peran biaya pendidikan bukan satu-satunya penentu tinggi rendahnya kualitas pendidikan. (Zamjani et al., 2020, pp. 25–26)

Dari hasil riset juga didapatkan komponen biaya satuan pribadi menurut jenis sekolah (Zamjani et al., 2020, p. 30), yang dapat disimpulkan bahwa :

1. Biaya transportasi tertinggi diperoleh oleh SLB karena perlunya transportasi khusus yang aman dalam mengantarkan anak ke sekolah.
2. Hal yang menarik adanya tingginya iuran sekolah pada jenjang SD dan SMP, padahal jumlah KBM nya lebih sedikit dibanding jenjang lain diperkuat lagi dengan adanya larangan pungutan.
3. Selain adanya iuran, orang tua juga masih terbebani dengan biaya keperluan alat dan bahan penunjang pelajaran, pakaian seragam dan perlengkapan sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah belum sepenuhnya mentaati penggunaan dana bos maupun ketentuan mengenai komite sekolah.

Dari data di atas, terlihat bahwa sarana dan prasarana mendapatkan alokasi yang lebih tinggi. Selanjutnya standar pembiayaan mendapat porsi yang juga tinggi dibanding dengan standar lainnya. Kondisi berbeda ditemukan pada sekolah C, dimana standar pembiayaan mencapai angka 68,62 persen. Tapi hal ini bisa dimaklumi karena sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang guru dan tenaga kependidikannya termasuk kepala sekolah non PNS. Kalau dilihat terkait dengan kurikulum, yakni SKL, SI, standar proses, dan penilaian mendapat alokasi yang cenderung kecil. Sehingga akan menjadi wajar jika capaian prestasi siswa pun tidak maksimal.

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang diisi oleh 130 siswa SMP yang berasal dari berbagai sekolah di kabupaten Purbalingga diperoleh data sebagai berikut :

No	Komponen	Besar pengeluaran (rata-rata)	Keterangan
1.	Biaya pembelian buku dan alat tulis (dalam 1 semester)	152.559	
2.	Pembelian seragam	931.516	
3.	Pembelian sepatu	161.354	
4.	Pembelian tas	151.353	
5.	Biaya transportasi ke sekolah (per hari)	8.106	Rata-rata pertahun : 256 hari efektif x 8.106 = 2.075.136
6.	Uang jajan (per hari)	10.300	Rata-rata pertahun : 256 hari efektif x 10.300 = 2.636.800
7.	Biaya lainnya Jumlah	variatif 6.108.718	Tanpa memperhitun kan biaya

Dari data tersebut, terlihat bahwa beban pendidikan yang masih ditanggung orang tua sangat tinggi yaitu 5x lipat lebih dibanding dengan alokasi dana BOS untuk siswa SMP yakni sebesar Rp 1.100.000. Biaya lainnya yang dikeluarkan orang tua cukup bervariasi, misalnya untuk membeli pulsa sebesar Rp. 40.000/bulan, map raport bagi siswa baru, parkir motor sebesar 1000/hari, kas kelas dan infaq, komite, serta pengeluaran lain yang tidak disebutkan nominalnya.

PEMBAHASAN

Selain pendekatan makro dan mikro dikenal juga pendekatan kecukupan (*adequacy approach*). Pengukuran biaya pendidikan sering kali menitikberatkan pada ketersediaan dana yang ada. Namun, secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar minimal untuk melakukan pelayanan pendidikan. Konsep pendekatan kecukupan menjadi penting karena memasukkan berbagai standar kualitas dalam perhitungan pembiayaan pendidikan sehingga berdasarkan berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat ditunjukkan adanya variasi biaya pendidikan yang cukup ideal untuk mencapai standar kualitas tersebut. Analisis kecukupan biaya pendidikan ini telah digunakan di beberapa negara bagian Amerika Serikat untuk mengalokasikan biaya pendidikan (Akdon et al., 2017, p. 32).

Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya :

- a. Besar-kecilnya sebuah institusi pendidikan
- b. Jumlah siswa
- c. Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai *highly labour intensive*)
- d. Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
- e. Kualifikasi guru
- f. Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)
- g. Perubahan dari pendapatan (*revenue theory of cost*) (Akdon et al., 2017, pp. 32–33)

Berkaitan dengan sistem zonasi, pendekatan kecukupan menjadi relevan, misalnya terkait dengan perubahan dari pendekatan. Secara umum, sekolah yang sebelumnya favorit akan mengalami penurunan pendapatan berupa partisipasi dari masyarakat. Hal ini dapat dipahami, karena dengan zonasi, sekolah tidak menolak anak-anak yang latar belakang orang tua dengan ekonomi menengah ke bawah maupun yang memiliki kesadaran pendidikan rendah asalkan secara zonasi masuk ke sekolah tersebut. Hal ini pun berlaku yang sama untuk sekolah yang sebelumnya bukan sekolah favorit, yakni orang tua yang secara ekonomi mampu serta memiliki kesadaran pendidikan yang bagus akan menyekolahkan anaknya di sekolah yang berada di zonasinya meskipun bukan sekolah yang menjadi favoritnya.

Permasalahan baru akan muncul pada sekolah dengan kategori favorit tetapi tetap mempertahankan diri dengan “selera” yang tinggi dalam memberikan layanan pendidikan. Hal ini menjadi diperparah, dengan peran komite yang tidak berpihak pada orang tua dengan ekonomi ke bawah. Dengan mengandalkan kekuatan finansial, sekolah maupun komite bersikeras mempertahankan kefavoritan sekolahnya. Hal ini menjadi bumerang, karena daya dukung partisipasi masyarakat berkurang khususnya dalam hal pembiayaan, apalagi tidak ditopang dengan kesadaran subsidi silang dari orang tua atau warga sekolah yang “*high class*” secara finansial.

Berkaitan dengan penganggaran, disadari sepenuhnya bahwa operasi institusi pendidikan belum didukung oleh pendanaan yang memadai, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Persoalan pengelolaan sekolah kita ini, bukan hanya terletak pada minimnya dana, melainkan masih banyak ditemukan distorsi atau deviasi penggunaannya. Telah tumbuh kesadaran di kalangan masyarakat bahwa uang tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Di tengah-tengah keterbatasan ini, sistem penganggaran di sekolah harus digerakkan oleh misi yang jelas. Khusus untuk instansi pendidikan, anggaran yang digerakkan oleh misi ini akan memberikan beberapa dampak positif, setidaknya secara hipotesis dan kualitatif. Anggaran yang digerakkan oleh misi ini : (1) memberikan dorongan kepada setiap komunitas sekolah untuk menghemat uang; (2) membebaskan komunitas sekolah untuk menguji berbagai gagasan baru; (3) memberikan otonomi kepada unsur manajemen sekolah untuk merespons setiap kondisi lingkungan yang berubah; (4) memberikan peluang kepada komunitas sekolah untuk dapat menciptakan lingkungan yang secara relatif dapat diramalkan; (5) sangat menyederhanakan proses anggaran; (6) menghemat dana untuk auditor atau belanja pegawai lain yang kurang relevan; dan (7) membebaskan komunitas sekolah dari belenggu pengucuran dana yang tidak relevan dengan spektrum tugas pokok dan fungsi manusia yang ada di dalamnya (Danim, 2006, p. 139).

Dengan melandaskan pada misi sebagai jbaran visi yang berpihak pada murid, maka akan timbul kesejahteraan secara psikologis (*wellbeing*) bagi semua pihak. Di sini semua pihak akan berpegang pada potensi yang dimiliki, bukan berpikir pada yang menjadi kelemahan. Misalnya dengan berkurangnya dukungan pendanaan karena efek zonasi maupun kebutuhan yang meningkat seiring dengan naiknya harga BBM, maka pihak sekolah perlu mengubah paradigma dari ketergantungan pada “pembiayaan yang tinggi”, khususnya bagi sekolah-sekolah yang selama ini menjadi sekolah favorit, ke arah optimalisasi sumber daya manusia yang dimiliki, khususnya guru dan siswa. Perlunya melakukan berbagai upaya-upaya yang lebih kreatif untuk mengatasi pendanaan yang berkurang, misalnya dengan membuat berbagai alat peraga alternatif dibanding membeli yang aslinya.

Pembahasan mengenai perspektif tentang biaya pendidikan itu sendiri sangat beragam. Ada yang mendekatinya dari sisi anggaran pemerintah, ada juga yang dari kontribusi masyarakat dan dunia usaha/industri terhadap pendidikan, bahkan ada yang lebih memusatkan perhatian kontribusi keluarga/rumah tangga terhadap pendidikan anak. Di sisi lain, ada yang lebih mendekatinya dari segi kapasitas pemerintah untuk membiayai pendidikan, dan ada juga yang memahaminya dari kapasitas masyarakat pada tataran akar rumput (grass root) untuk membiayai pendidikan dalam konteks *community-based financing* (Supriadi, 2003, p. 43).

Dilihat dari sumber dan jenis pembiayaan, ada studi yang memusatkan perhatian pada biaya tetap (*fixed cost*) yang lebih mudah dihitung, tetapi ada juga yang lebih melihatnya dari segi *variable cost* bahkan *invisible cost* yang nonbudgeter. Misalnya, pada tataran satuan pendidikan, diduga lebih besar dana non-budgeter yang tidak masuk RAPBS daripada yang tercatat atau termasuk dalam RAPBS. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan angka persis tentang berapa sebenarnya satuan pendidikan di sekolah bila semua komponen dan sumber dana itu diperhitungkan (Supriadi, 2003, p. 43)

Dari data pada bagian sebelumnya, masih banyak sekali dana nonbudgeter yang ditanggung, khususnya oleh orang tua. Kuesioner yang dibuat oleh penulis tidak selengkap seperti yang dilakukan pada hasil penelitian sebelumnya terkait dengan kebutuhan pribadi siswa (Zanjani et al., 2020).

No	Komponen pertanyaan penelitian sebelumnya	Komponen pertanyaan penulis
1.	Buku dan alat tulis	Buku dan alat tulis
2.	Seragam dan perlengkapan	Seragam
3.		Sepatu
4.		Tas
5.	Alat dan bahan pelajaran	-
6.	Transportasi siswa	Transportasi
7.	Kursus di luar sekolah	-
8.	Karya wisata	-
9.	Iuran sekolah	-
10.	Uang saku	Uang jajan
11.	Biaya pendidikan lainnya	Biaya lainnya

Perbedaan yang ada itu ada alasannya sebagai berikut.

1. Seragam dan perlengkapan dibuat lebih rinci untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detil, terkait seragam (dalam hal ini termasuk kaos dan atributnya), sepatu dan tas secara terpisah
2. Alat dan bahan pelajaran tidak ditanyakan, terkait dengan kekhawatiran adanya dugaan banyaknya kegiatan-kegiatan sekolah yang masih meminta tambahan dana dari siswa terkait dengan proses belajar-mengajar, khususnya yang membutuhkan praktik. Termasuk juga tidak menanyakan kebutuhan membeli buku pendamping, khawatir disalahpersepsikan dengan adanya pengadaan LKS.
3. Kursus atau les di luar sekolah tidak dipertanyakan karena kekhawatiran adanya dugaan guru yang ikut menyelenggarakan kegiatan kursus/les tersebut.
4. Karya wisata tidak dipertanyakan, terkait dengan kekhawatiran sekolah kecenderungan terlibat dari bisnis pengusaha travel.
5. Iuran sekolah tidak ditanyakan, terkait dengan kekhawatiran adanya berbagai gugatan dari berbagai pihak terkait dengan sumbangan komite.

Meskipun demikian, ternyata terkait dengan pertanyaan biaya lainnya, ada sebagian yang memberikan tanggapan dengan memberikan besarnya biaya komite yang disumbangkan, kas kelas, infaq dan sumbangan lain, maupun hanya dengan mengatakan punya tambahan tanggungan lainnya tanpa menyebutkan nominalnya.

Selanjutnya kita bandingkan hasil dari penelitian di atas dengan yang penulis lakukan (khusus SMP)

No	Komponen pertanyaan penelitian sebelumnya	Besaran	Komponen pertanyaan penulis	Besaran
1.	Buku dan alat tulis	368.735	Buku dan alat tulis	152.599
2.	Seragam dan perlengkapan	1.102.820	Seragam	931.516
3.			Sepatu	161.354
4.			Tas	151.353
5.	Alat dan bahan pelajaran	272.018	-	-
6.	Transportasi siswa	2.628.472	Transportasi	2.075.136
7.	Kursus di luar sekolah	1.513.659	-	-
8.	Karya wisata	368.499	-	-
9.	Iuran sekolah	1.159.155	-	-
10.	Uang saku	2.124.071	Uang jajan	2.636.800
11.	Biaya pendidikan lainnya	1.297.736	Biaya lainnya	-
12.	Jumlah Biaya Riil	4.245.027		6.108.718
13.	Jumlah Jika Seluruh Komponen Terpenuhi	10.834.164		

Dengan membandingkan kedua hasil itu, perbedaan yang cukup menyolok pada besaran pembelian buku dan alat tulis. Hal ini boleh jadi sebenarnya sama dengan 2 kemungkinan. Pertama, data yang kiri memasukkan buku kebutuhan pendamping. Kedua, data yang sebelah kanan hanya melakukan pengadaan sebanyak 1 kali. Adanya perbedaan antara transportasi sekolah dan uang saku sangat mungkin. Pertama, perbedaan wilayah. Kedua, tumpang tindih atau tercampurnya antara uang buat transportasi dengan uang saku/jajan.

Tetapi, dengan perbedaan tersebut ada titik temu yang sama, yakni adanya perbedaan yang signifikan antara beban pendanaan yang masih ditanggung oleh orang tua dengan yang ditanggung oleh negara melalui BOS. Tentunya, harus menjadi koreksi bersama, agar ada sebagian beban pribadi yang diambil oleh BOS seperti misalnya pemenuhan seragam, perlengkapan sekolah maupun pemenuhan alat dan bahan. Atau dengan kata lain, orang tua masih menanggung beban pendanaan yang tinggi di dalam kelangsungan pendidikan anak-anaknya.

Riset-Riset lain

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada sekolah di Gowa Sulawesi Selatan tahun 2018 didapatkan bahwa biaya operasional non personalia tingkat SMA adalah Rp. 735.000 s.d Rp. 3.850.000 per siswa per tahun, sedangkan untuk SMK berkisar Rp. 1.845.000 s.d Rp. 4.429.000 per siswa per tahun. Padahal berdasarkan Juknis BOS tahun 2018, dana BOS untuk SMA dan SMK sebesar Rp. 1.400.000 per siswa per tahun. Artinya sekolah harus menanggung beban yang cukup besar atau dapat dikatakan dana BOS tidak akan mencukupi kebutuhan. Tentunya sekolah harus menggalang dana baik dari orang tua, alumni, CSR dan sumber lainnya (Perdana, 2019). Hal yang sama juga ditemukan di SMK Sais 1 Bandung tahun ajaran 2020/2021 didapatkan hasil bahwa biaya satuan pendidikan tiap peserta didik sebesar 2.857.716,66 (Widiasih et al., 2021). Penelitian yang dilakukan di SMO Negeri 1 Depok Sleman tahun 2014/2015 juga menunjukkan angka yang sudah tinggi, yakni sebesar Rp. 3.791.384 per tahun. (Kholifatun Azizah, 2015)

Sebuah riset mengenai biaya personal siswa yang meliputi pembelian buku dan alat tulis, tas sekolah dan sejenisnya, sepatu, pakaian seragam, serta uang saku/jajan pada 5 SD di Kabupaten Donggala pada tahun 2021 diperoleh angka rata-rata sebesar Rp. 2.490.325 (Gagaramusu et al., 2021). Tentunya angka ini pun sangat jauh dibandingkan dengan besarnya BOS yang diberikan pemerintah.

Apa yang dihasilkan dari berbagai riset baik yang dilakukan oleh peneliti maupun dari berbagai referensi lain menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang ditanggung sekolah maupun orang tua masih jauh dari pada yang diberikan oleh Pemerintah. Sekolah bisa melakukan upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan selain dari pemerintah dengan tetap menjunjung tinggi efisiensi, keterbukaan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya orang tua atau masyarakat harus memiliki kesadaran untuk mau melakukan subsidi silang untuk membantu mengurangi beban bagi orang tua yang tidak mampu.

KESIMPULAN

Ada dua pendekatan dalam pembiayaan, yakni pendekatan secara makro (nasional) dan mikro (satuan pendidikan). Pembiayaan pendidikan skala makro (nasional) yang berupa 20 % dari APBN meliputi seluruh pengeluaran secara nasional, dengan kemdikbud sebagai salah satunya. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa masih tingginya beban biaya yang ditanggung orang tua untuk melangsungkan pendidikan anaknya. Apalagi dengan adanya zonasi, sekolah dan komite agar lebih memperhatikan kondisi orang tua, khususnya yang berada pada kondisi menengah ke bawah. Dengan memahami secara utuh kedua pendekatan ini, diharapkan adanya kesamaan pemahaman bahwa pendidikan adalah usaha gotong royong. Pemerintah berupaya menaikkan anggaran pendidikan, tetapi sekolah juga tidak berlebihan meminta dana dari masyarakat, karena memang beban masyarakat juga besar dalam menanggung biaya lain. Sebaliknya, masyarakat juga menyadari bahwa dana sekolah yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas..

REFERENCES

- Akdon, Kurniady, D. A., & Darmawan, D. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (P. Latifah (Ed.); Cetakan ke). PT Remaja Rodakarya.
- Danim, S. (2006). *Visi Baru Manajemen Sekolah : Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* (Cetakan Pe). PT Bumi Aksara.
- Gagaramusu, Y., Firmansyah, A., . N., & . S. (2021). Analisis Biaya Personal Pendidikan Siswa Sekolah Dasar Kabupaten Donggala. *Educate : Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32832/educate.v1i1.6008>
- Kholifatun Azizah, S. (2015). Analisis Satuan Biaya Pendidikan Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Depok Sleman. *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 1(2), 1–17.
- Machali, I., & Hidayat, A. (2018). *The Handbook of Education Management* (Edisi kedua). Prenadamedia Group.
- MoEC. (2021). *Postur Anggaran Pendidikan 2021*. Kemdikbud. <https://roren.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Postur-Anggaran-2021.pdf>

- Perdana, N. S. (2019). Analisis Pembiayaan Pendidikan Menengah di Kabupaten Gowa. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 7(1), 61–70.
- Rojji, M., Nurdiyan, P., & Dkk. (2020). Buku Ajar Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam. In E. F. Fahyuni & S. B. Sartika (Eds.), *Umsida Press* (Cetakan Pe). UMSIDA Press. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-7578-66-6>
- Supriadi, D. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Cetakan pe). PT Remaja Rodakarya.
- Widiasih, K. S., Pratama, S., & Berlian, U. C. . . (2021). Analisis Biaya Satuan Pendidikan di SMK SAIS 1 Kabupaten Bandung Tahun Ajaran 2020/2021. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 1(3), 101–113. <https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled/article/view/7>
- Zamjani, I., Herlinawati, & dkk. (2020). Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Satuan Pendidikan Formal. In I. K. D. Hermawan & N. B. V. Ali (Eds.), *Puslitjakdikbud* (Cetakan Pe). Kemdikbud.